

BAB IV

KESIMPULAN

Penelitian terhadap kasus pembangunan pipa kontroversial *Dakota Access Pipeline* (DAPL) membuktikan bahwa terdapat hegemoni dari ketiga aktor pembangunan pipa yakni negara, korporasi, serta rejim ekonomi global yang menyebabkan pembangunan DAPL berhasil dilaksanakan. Dalam praktiknya ketiga aktor tersebut membentuk *worldview* akan krusialnya minyak bagi Amerika Serikat yang disebarakan melalui agen-agen suprastruktur termasuk media, organisasi non-profit, hingga badan pemerintahan.

Pembangunan pipa minyak *Dakota Access Pipeline* (DAPL) pertama kali diajukan kepada pemerintah federal pada akhir tahun 2014. Konstruksi pipa, kemudian, menjadi kontroversial karena rute pipa minyak yang melewati kawasan danau Oahe dan hanya berjarak setengah mil dari reservasi suku Standing Rock merupakan rute baru setelah rute lama yang direncanakan melewati Bismarck, ibu kota Dakota Utara, mendapat perlawanan dari warga yang mayoritas berkulit putih karena khawatir akan pencemaran sumber mata air di wilayah tersebut. Masyarakat adat dalam hal ini juga melakukan penolakan karena khawatir akan kebocoran pipa yang dapat mencemari danau yang dijadikan sumber air minum oleh Standing Rock. Meski demikian, *United States Army Corps of Engineer* (USACE) tetap memberikan perizinan kepada pihak korporasi untuk menjalankan konstruksi pipa di kawasan danau dan menyatakan bahwa pembangunan di kawasan tersebut aman. Di sisi lain, rute pipa baru yang berjarak setengah mil dari reservasi berada pada tanah sengketa yang, meskipun berada di bawah nama pemerintah federal Amerika Serikat, tidak pernah diserahkan secara resmi oleh masyarakat adat berdasarkan perjanjian *Fort Laramie* 1856. Kawasan tersebut juga dipercaya masyarakat adat sebagai “*the sacred place*” dimana leluhur dari suku adat disemayamkan di wilayah yang akan ditanami pipa oleh pihak

korporasi. Kontroversi kemudian berlangsung, membawa masyarakat adat, aktivis HAM, dan aktivis lingkungan berhadapan dengan pihak korporasi, negara, serta rejim ekonomi global yang mendukung pembangunan pipa yang akan mendorong terciptanya kemandirian energi bagi Amerika Serikat.

Di sisi lain pihak pendukung proyek pipa yakni Amerika Serikat, pihak korporasi pipa, serta institusi finansial global pendana proyek mendorong pembangunan pipa karena hal tersebut, secara ekonomi, akan berdampak baik bagi Amerika Serikat termasuk pendapatan pajak negara bagian, pembukaan lapangan kerja bagi warga Amerika, kerendahan biaya energi, serta ekonomi Amerika Serikat secara keseluruhan yang karena akan meningkatkan ekspor minyak sejak larangan ekspor minyak Amerika Serikat dicabut pada periode pemerintahan Presiden Obama di akhir tahun 2015. Meski demikian, konstruksi pipa yang ditanam dibawah badan danau Oahe dianggap menodai nilai *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dari *United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) serta mengancam hak berburu dan menangkap ikan (*hunting and fishing rights*) yang merupakan hak khusus bagi suku adat di Amerika sebagai *first nation*.

Penelitian ini mencoba membuktikan bahwa terdapat hegemoni yang menyebabkan Amerika Serikat yang memiliki predikat sebagai negara liberal dan demokratis dimana suara semua pihak didengarkan dan dihargai menjadi negara yang mendikte pembangunan pipa dan tidak menghiraukan suara masyarakat adat yang mendapat predikat sebagai *first nation* dan memiliki *privilege* melalui kerangka *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) dari PBB.

Sebagai negara industri Amerika Serikat memiliki ketergantungan terhadap konsumsi minyak yang mengharuskan Amerika untuk mengimpor minyak dari luar negeri karena kurang memadainya jumlah produksi minyak

domestik. Di lain sisi, mayoritas negara penghasil minyak yang bekerja sama dengan Amerika merupakan negara yang secara politik kurang stabil seperti Suriah, Aljazair, Pakistan, Iraq, Chad, Kongo, dan Saudi Arabia. Selain itu, negara-negara tersebut seringkali memiliki kepentingan luar negeri yang bertentangan dengan Amerika yang jika kepentingan tersebut bersinggungan akan sangat mudah bagi negara eksportir untuk mengembargo kiriman minyak bagi Amerika Serikat. Kekuatan geopolitik yang dimiliki oleh negara-negara eksportir di satu sisi menjadikan Amerika tidak leluasa dalam menjalankan politik luar negerinya, dan di sisi lain mengharuskan Amerika untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk konsumsi minyak impor.

Keinginan Amerika untuk dapat mandiri dalam bidang energi diuntungkan dengan adanya peningkatan signifikan pada produksi sumur-sumur minyak di Amerika, termasuk pada formasi Bakken di Dakota Utara. Peningkatan produksi minyak domestik juga memungkinkan Amerika Serikat untuk mendapatkan suplai minyak mentah dengan harga yang lebih miring, serta terlepas dari kekuatan geopolitik yang pada masa sebelumnya menjadi “senjata” bagi negara-negara penghasil minyak dunia. Hal ini kemudian mendorong Amerika Serikat untuk berfokus pada produksi energi domestik dan membentuk kebijakan energi domestik yang dapat mempercepat terciptanya kemandirian energi (*energy independence*) dengan mendorong dibukanya lahan-lahan federal untuk eksplorasi sumber energi fosil, pembangunan infrastruktur pendukung sektor energi seperti pipa-pipa minyak, serta membatalkan kebijakan pada masa pemerintahan sebelumnya yang dianggap sebagai *job killer* dan dapat menghambat produksi energi fosil.

Dakota Access Pipeline (DAPL) dalam kasus ini merupakan bagian dari rencana Amerika Serikat untuk dapat terlepas dari pengaruh negara lain dan menjadi independen dalam bidang energi. Pembangunan pipa yang menghubungkan sumur minyak Bakken di Dakota Utara dengan pengilangan minyak di kawasan Illinois dilakukan

dengan menghegemoni masyarakat melalui skema-skema yang dapat dijelaskan menggunakan konsep hegemoni milik Antonio Gramsci. Hegemoni, ungkap Gramsci, merupakan persetujuan “cuma-cuma” masyarakat terhadap keputusan pemerintah karena masyarakat telah memiliki ideologi dan *worldview* termasuk kultur, nilai dan norma yang sama dengan kelompok penguasa sehingga memandang keputusan yang hanya menguntungkan kelompok pemerintah sebagai “kemaslahatan bersama”. Dalam menyebarkan *worldview* tersebut, kelompok penguasa menggunakan agen-agen suprastruktur seperti kelompok masyarakat, media massa, hingga badan pemerintahan. Sejalan dengan hegemoni Gramsci, Amerika Serikat, korporasi, serta rejim ekonomi global menghegemoni masyarakat melalui penciptaan kultur minyak melalui media massa, organisasi non-pemerintah, hingga bantuan bagi pembangunan masyarakat yang berdampak pada penerimaan masyarakat Amerika teradap proyek pembangunan DAPL.

Penelitian terhadap kasus pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL) memiliki relevansi yang erat dengan studi hubungan internasional. DAPL merupakan isu kontemporer yang menunjukkan bagaimana aktor diluar negara seperti institusi finansial dan korporasi dapat turut terlibat dan mempengaruhi kebijakan politik domestik Amerika Serikat. DAPL juga menjelaskan bagaimana ideologi yang mencakup *worldview*, norma, kultur, serta model konsumsi dapat digunakan untuk menyetir suatu negara untuk dapat menerima kebijakan dari *the rulling class*, yang dalam kasus ini adalah Amerika Serikat.

Meski demikian, penulis menemukan masih terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini. Terkait relasi antara institusi finansial global dengan proyek pembangunan *Dakota Access Pipeline* , hanya terdapat sedikit sumber yang menjelaskan mengenai keterkaitan rejim ekonomi global dengan proyek pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL), yang sebenarnya memiliki peran yang sangat krusial

sebagai penyedia dana dalam berjalannya pembangunan pipa. Sebagai “aktor dibalik layar”, bank-bank dan institusi finansial internasional yang terlibat dalam pembangunan DAPL hanya mengeluarkan statemen mengenai pengkajian lebih lanjut terhadap kontroversi pembangunan pipa yang melibatkan masyarakat adat serta aktivis lingkungan. Statemen dari pihak bank dan institusi finansial dunia juga terbatas pada bagaimana kerangka *Environmental and Social Responsibility Management* (ESRM) telah diterapkan dalam pengkajian terhadap proyek DAPL sehingga pipa milik *Energy Transfer Partners* (ETP) dianggap telah memenuhi standar yang digunakan untuk pendanaan proyek infrastruktur.

Dari seluruh temuan pada penelitian ini, penulis berargumen bahwa berdasarkan konsep hegemoni milik Antonio Gramsci, pembangunan pipa *Dakota Access Pipeline* (DAPL) di Amerika Serikat berhasil dilaksanakan karena adanya penyerapan *worldview* dari kelompok penguasa, yang dalam kasus ini adalah Amerika Serikat, korporasi, serta institusi finansial global, oleh masyarakat. Dalam praktiknya kelompok penguasa menyebarkan *worldview* mereka dengan membentuk diskursus mengenai peran serta urgensi minyak bagi Amerika Serikat baik dalam aspek keamanan nasional maupun secara ekonomi, termasuk narasi *energy independence* dan *energy dominance*. Amerika Serikat sebagai negara juga membentuk kebijakan yang mendukung posisi korporasi melalui pembukaan jutaan acre tanah federal untuk keperluan eksplorasi minyak. Wacana lain yang disebarkan adalah aspek keamanan pipa bagi lingkungan sebagai salah satu moda transportasi minyak yang telah digunakan secara luas di Amerika. Diskursus tersebut, kemudian, disebarkan melalui agen-agen suprastruktur yakni media massa, asosiasi dan kelompok masyarakat, hingga badan-badan pemerintahan.